

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dewi, Dian.S.K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Djohan,D.,dkk. (2024). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Intelegensia Media.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2020). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Jumroh & Pratama, Y. (2021). *Impelementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri
- Keban,Y.T (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, AF. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Harfa.
- Purwanto, Erwan, et.al. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rusdiana, A., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia
- Saleh, Sirajuddin. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Agma
- Sawir,M. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.

Jurnal

- Achmad, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Juru Parkir Liar Terhadap Ketertiban Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon. *Penelitian Administrasi Publik*, 4(05), 1–23.
- Aninda, M. K., & Suryaningsih, M. (2019). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 Di Kelurahan

- Krobokan Kota Semarang. *Departemen Administrasi Publik Fisip Undip*, 2.
- Fatkhul Muin. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79.
- Gunawan, G., & Nuh, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022. *Jurnal Lanskap Politik*, 1(2), 76. <https://doi.org/10.31942/jlp.2023.1.2.8377>
- Ihwanudin, R., ., Y., & Widayati, W. (2013). Kajian Tentang Penetapan Target Retribusi Parkir Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(1), 216-230
- Juita, F. H., Wahyudi, A., Studi, P., Terapan, S., & Perpajakan, A. (2024). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *Akuntansi Prima*, 6(1), 1–27.
- Kurniawan, Teguh. (2018). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan Npm Ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Adm Negara*. Volume 7, hal. 52-70
- Maani, D.K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 47
- Mahardita, P. A., Ilmu, F., Politik, I., & Diponegoro, U. (2021). *Pengelolaan Praktik Parkir Ilegal Di Kecamatan Tembalang (Studi Kasus Kawasan Universitas Diponegoro)*.
- Meiharta, R. I. M. J. (2014). Kajian Tentang Penetapan Target Retribusi Parkir Di Kota Semarang. *Ilmu Pemerintahan Fisip Undip*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Mursid, M. C., Setyani, R. A. G., Lestari, I., & Jaya, Y. F. T. (2023). Implementasi Kebijakan Parkir di Kawasan Central Business District Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 21(2), 48–58. <https://doi.org/10.54911/litbang.v21i2.199>
- Mutiarani Kusuma Aninda, M. S. (2019). *Implementation of the Policy of Public Roadside Parking Retribution Based on Perda No . 2 Tahun 2012 in Krobokan Urban-Village Semarang City*. 2.
- Noviantoro, D., & Ferry Rosando, A. (2023). Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar di Kota Surabaya. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1581–1591.
- Putri, C., Alzena, W., Marom, A., Nurcahyanto, H., & Soedarto, J. (2023). Implementasi Program Parkir Elektronik (E-Parking) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Jalan Depok). *Fisip UNDIP*, 1–13.
- Rani, F. A., Syahbandir, M., & Purnama, E. (2010). Kontribusi PAD dalam APBD

sebagai Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum (Kanun)*, 12(2), 235–255.

Rizwan, M. A., Basor, Y. F. F., & Sampurna, R. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 371–385.

Rohmah, M. Z., Hidayat, R., & Argenti, G. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(2), 591. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.591-600>

Setiaji, P. D., & Santoso, S. R. (2019). Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Manajemen*, 1–15.

Setiawati, I., & Subowo, A. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Manajemen*, 8(2), 1–13.

Sulila, I. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(2), 349–366. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/109>

Wicaksana, P. G. M. A., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengendalian Parkir Liar Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 3(3), 563–568. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5348.563-568>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Perundang-Undangan. (2009). Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Perundang-Undangan. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan. (2022). Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan. (2004). Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Perundang-Undangan. (2023). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan. (2021). Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan.

Artikel Berita

- Halo Semarang. (2023). *Dishub Kota Semarang: Pendapatan Sektor Retribusi Parkir Tahun 2023 Ditarget Sebesar Rp 6 Miliar*. <https://halosemarang.id/dishub-kota-semarang-pendapatan-sektor-retribusi-parkir-tahun-2023-ditarget-sebesar-rp-6-miliar/>. Diakses pada April 2025
- Kompasiana. (2024). *Urbanisasi Berlebih, Kota Semarang Mengalami Deindustrialisasi?*. <https://www.kompasiana.com/yumnahuwaida3921/6728ebe9c925c46c610a1e03/urbanisasi-berlebih-kota-semarang-mengalami-deindustrialisasi> Diakses pada Maret 2025
- Radio Republik Indonesia. (2023). *Ita Terus Genjot Raihan Retribusi Parkir*. <https://rri.co.id/keuangan/308538/ita-terus-genjot-raihan-retribusi-parkir>. Diakses pada Maret 2025
- Republik Merdeka Jawa Tengah. (2024). *Masih Minim Lahan Parkir, Dishub Kota Semarang Akui Banyak Parkir Liar*. <https://www.rmoljawatengah.id/masih-minim-lahan-parkir-dishub-kota-semarang-akui-banyak-parkir-liar>. Diakses pada April 2025
- Tribun Jateng. (2025). *Jelang Akhir Tahun, Target Retribusi Parkir di Kota Semarang Hanya Tercapai 17 Persen, Ini Sebabnya*. <https://jateng.tribunnews.com/semarang/1229867/jelang-akhir-tahun-target-retribusi-parkir-di-kota-semarang-hanya-tercapai-17-persen-ini-sebabnya>. Diakses pada April 2025